

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanitijo, Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Hunger, F.W.F., 1932, *Adatdesa's en Gouvernementsdesa in Zuid-Bali*, diterjemahkan oleh I Wayan Dangin, Denpasar.
- Indroharto, 1990, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1986, *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, Jakarta.
- , 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, H.M. Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Predana Media, Jakarta.

Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum dalam konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2005, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.

Syaukani, et.al, 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjaja, H.A.W., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Windia, Wayan P., 2008, *Menyoal Awig-Awig: Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*, Lembaga Dokumentasi dan publikasi FH UNUD, Denpasar.

-----, 2010, *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi*, Udayana University Press, Denpasar

Yasin, Muhammad, dkk, 2015, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Jakarta.

### **Tesis, Skripsi, Seminar:**

Beni Kharisma Arrasuli, 2012, “Dinamika Pengaturan dan Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *tesis*, Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

I Nyoman Pranata Sena, 2015, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa di Kabupaten Kulon Progo”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Made Dwi Mas Utami, 2014, “Kedudukan dan Kewenangan Desa Pakraman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ni Putu Wilda Karismawati, 2016, “Kedudukan Desa di Bali Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Wayan P. Windia, 2003, “Penataran Pengetahuan Teritorial bagi Bintara/Babinsa Jajaran Korem 163/Wirasatya”, *seminar*, dilaksanakan oleh Korem 163/Wirasatya Bali, bertempat di Gedung Pertemuan Wirasatya, Denpasar.

#### **Wawancara :**

Nurjaya, Gede, Juru Bicara Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali, wawancara langsung pada tanggal 18 Oktober 2016 di Sekretariat Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali.

Windia, Wayan P., Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, wawancara langsung pada tanggal 24 Oktober 2016 di Sekretariat Pusat Penelitian Hukum Adat, Gedung Perpustakaan Pascasarjana, Universitas Udayana.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 3).

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

#### **Internet:**

A.A. Istri Ngurah Dyah Prami, "Meningkatnya Intensitas Konflik Desa Pakraman Bali", [www.e-jurnal.com/2015/01/meningkatnya-intensitas-konflik-des.html?m=1](http://www.e-jurnal.com/2015/01/meningkatnya-intensitas-konflik-des.html?m=1), diakses tanggal 10 Oktober 2015.

Anak Agung Gde Putu Wahyura, "Desa Dinas dan Desa Pekraman Belum Didaftarkan ke Mendagri Karena Ini", <http://bali.tribunnews.com/2015/09/18/desa-dinas-dan-desa-pekrman-belum-didaftarkan-ke-mendagri-karena-ini>, diakses tanggal 19 Maret 2017.

Dewa Wiguna, “Anggota DPD Bali Sepakat Dukung Desa Adat”, <http://www.antarabali.com/berita/61082/anggota-dpd-bali-sepakat-dukung-desadadat>, diakses tanggal 25 Desember 2015.

Dewata News, “DPRD dan Pemkot Denpasar Sepakat Desa Dinas dan Adat Dapat Berjalan Seperti Sekarang”, <http://www.dewatanews.com/2015/01/dprd-dan-pemkot-denpasar-sepakat-desadadat.html#ixzz4bIB0h3wV>, diakses tanggal 19 Maret 2017.

I Made Darna, “Tergiur Dana Desa Besar Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa”, [balitribune.co.id/content/tergiur-dana-besar-banyak-kelurahan-ingin-jadi-desadadat](http://balitribune.co.id/content/tergiur-dana-besar-banyak-kelurahan-ingin-jadi-desadadat), diakses tanggal 19 Maret 2017.

Made Nurbawa, “Bali dalam Dilema UU Desa”, <http://metrobari.com/2014/04/19/bali-dalam-dilema-uu-desadadat/>, diakses tanggal 10 Oktober 2015.

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, “Desa Adat dalam UU Desa”, <https://www.slideshare.net/mobile/DesaAdatBali/kajian-mudp-bali-terkait-uu-desadadat>, diakses tanggal 19 Maret 2017.

Mutia Ramadhani, “Pemimpin Masyarakat Bali Sepakat Tunda Pendaftaran Desa ke Pusat”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/13/ni4asa-pemimpin-masyarakat-bali-sepakat-tunda-pendaftaran-desadadat-ke-pusat>, diakses tanggal 25 Desember 2015.

Ni Luh Rhismawati, “Forum Perbekel: Bupati Tidak Perlu Memilih Desa”, <http://www.antarabali.com/berita/65904/forum-perbekel-bupati-tidak-perlu-memilih-desadadat>, diakses tanggal 19 Maret 2017.

Ni Luh Rhismawati dan Budi Suyanto, “Majelis Desa Pakraman Temui Pansus UU Desa”, <http://www.antarabali.com/berita/65752/majelis-desadadat-pakraman-temui-pansus-uu-desadadat>, diakses tanggal 25 Desember 2015.

Pasek Diantha, “Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, <https://denpasarkota.go.id/6/download>, diakses tanggal 11 Februari 2016.

Rofiqi Hasan, “UU Desa Dinilai Ancam Otonomi Desa Adat di Bali”, <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/19/058608012/uu-desadadat-dinilai-ancam-otonomi-desadadat-di-bali>, diakses tanggal 25 Desember 2015.

Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, “Kelurahan Gianyar Berprakarsa Menjadi Desa”, <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca>

[berita/5455/Kelurahan-Gianyar-Berprakarsa-Menjadi-Desa](#), diakses tanggal 19 Maret 2017.

Sekretariat Daerah Kota Denpasar, “Terkait UU Desa: Walikota Denpasar Tetap Komitmen Jaga Adat dan Budaya Bali”, <http://setda.denpasarkota.go.id/index.php/baca-berita/9295/Terkait-UU-Desa>, diakses tanggal 19 Maret 2017.

Sekretariat Daerah Propinsi Bali, “1.488 Desa Pakraman dan 716 Desa Dinas Akankah Dilebur? Pastika Harapkan Bupati Hadir Bahas UU Desa”, <http://www.propinsibali.com/2014/07/1488-desa-pakraman-dan-716-desa-dinas.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2015.

Sekretariat Daerah Propinsi Bali, “Bingung Pilih Adat atau Dinas, Dewan Wacanakan Pansus UU Desa”, <http://www.propinsibali.com/2014/10/bingung-pilih-adat-atau-dinas-dewan.html>, diakses tanggal 19 Maret 2017.